

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI BANK SAMPAH PELITA DUSUN I (Program Corporate Social Responsibility PT. Solusi Bangun Indonesia)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht>

Recommended Citation

(2021) "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI BANK SAMPAH PELITA DUSUN I (Program Corporate Social Responsibility PT. Solusi Bangun Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 3: Iss. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol3/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Sosial Humaniora Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI BANK SAMPAH PELITA DUSUN I
(Program Corporate Social Responsibility PT. Solusi Bangun Indonesia)**

Arie Firdha Amalia¹, Indra Lestari Fauzi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia,

Corresponding Author's Email: ariefirdhaa@gmail.com

ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan merupakan salah satu upaya merealisasikan tujuan pertama SDGs yaitu mengurangi kemiskinan masyarakat. Salah satu Program CSR PT Solusi Bangun Indonesia adalah Bank Sampah Pelita Dusun I. Pengembangan bank sampah dengan swadaya masyarakat di Desa Kembang Kuning didasari oleh beberapa permasalahan lingkungan. Penekan penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang lebih berperspektif perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah Pelita Dusun I. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada tim Departemen *Community Relation* PT. SBI, pengurus dan nasabah Bank Sampah Pelita Dusun I. Dalam pelaksanaan program CSR, terdapat lima tahapan yang dilakukan oleh PT SBI, yaitu tahap persiapan, pemetaan sosial, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan yang dilakukan oleh PT SBI secara umum memiliki kesamaan dengan konsep tahapan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Adi (2012) dan secara keseluruhan menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat.*

Kata kunci : Bank Sampah, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the efforts to realize the first goal of the SDGs, namely reducing community poverty. One of the CSR programs of PT Solusi Bangun Indonesia is the Pelita Dusun I Waste Bank. The development of a non-governmental waste bank in Kembang Kuning Village is based on several environmental problems. The emphasis of this research is on empowering community-based communities with a more women's perspective. This study aims to analyze the process of empowering women through the Pelita Dusun I Waste Bank. To answer research problems, this study uses a qualitative approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with the Community Relations Department team of PT. SBI, management and customers of the Pelita Dusun I Waste Bank. In the implementation of the CSR program, there are five stages carried out by PT SBI, namely the preparation stage, social mapping, planning, implementation and evaluation. The stages carried out by PT SBI in general have similarities with the concept of community development stages from Adi (2012) and overall describe the existence of community involvement.

Keywords: Waste Bank, Corporate Social Responsibility, Women Empowerment

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2000 – 2015. SDGs berisi tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku universal.

Misi-misi ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah dunia mulai dari pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan infrastruktur hingga pelestarian lingkungan. Salah satu bagian yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu negara adalah tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta GEM, yang mencakup memiliki kesetaraan pendapatan, menerima pendidikan yang sama, atau proporsi yang aktif dalam politik.

Dalam mengukur hasil pembangunan yang berperspektif gender di Indonesia dapat menggunakan beberapa indikator, diantaranya digunakan IPG dan IDG. Pada tahun 2019, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 19 provinsi dengan nilai IPG di bawah rata-rata nasional. Sedangkan untuk nilai IDG hanya terdapat lima (5) provinsi yang dapat mencapai nilai di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di banyak daerah di Indonesia.

Secara nasional, sejak tahun 2016 IPM Indonesia sudah mencapai status tinggi yaitu 70,18. Capaian nilai IPM terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019, IPM Indonesia mencapai nilai 71,92 dan termasuk dalam kategori tinggi. Meski demikian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, nilai IPM Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan, karena nilai IPM perempuan masih tertinggal jika dibandingkan dengan nilai IPM laki-laki. Tahun 2019, IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM 69,18 dan nilai IPM laki-laki yang berstatus tinggi telah mencapai nilai 75,96.

Tidak hanya berdampak pada capaian IPM, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen. Persentase penduduk miskin ini meningkat 0,97 persen poin dibandingkan bulan September 2019. Jumlah penduduk miskin tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi di Kabupaten. Kabupaten Bogor menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 465.670.

Program pengentasan kemiskinan terus digagas pemerintah dengan seksama dan pelaksanaannya terus diawasi dengan harapan akan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan gender adalah salah satu masalah yang turut menyumbang semakin rentannya kemiskinan di Indonesia. Dalam memberdayakan perempuan dalam pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi juga diharapkan ada partisipasi dari pihak swasta/perusahaan. Salah satu bentuk partisipasi pihak swasta/perusahaan adalah dalam bentuk pelaksanaan program tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Konsep dan pelaksanaan CSR mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kini CSR tidak lagi bersifat sukarela tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Seiring berjalannya waktu, CSR juga tidak hanya berorientasi pada nilai perusahaan (*single bottom line*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), melainkan juga harus memperhatikan tiga pilar utama (*triple bottom lines*), yaitu aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*), dan aspek lingkungan (*planet*) yang saling bersinergi satu sama lain untuk memberdayakan masyarakat (Solihin, 2009). CSR juga tidak hanya menjadi suatu kewajiban tetapi juga merupakan bentuk promosi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi social yang harus dilakukan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha (Wibisono, 2007).

Sebagai produsen pemanfaatan energi dan sumberdaya bahan mentah, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab atas dampak operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya melalui program CSR, diantaranya program infrastruktur, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi lokal. CSR PT PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak operasional dari kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Desa-desa sekitar yang terkena dampak operasional tersebut dibagi ke dalam tiga ring berdasarkan jarak wilayah dan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat, yaitu Ring 1, Ring 2, dan Ring 3.

Program CSR perusahaan, salah satunya dalam bidang pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi lokal merupakan bentuk salah satu upaya merealisasikan tujuan pertama SDGs yaitu untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Salah satu CSR PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik

Narogong adalah Bank Sampah Pelita Dusun I yang berlokasi di Desa Kembang Kuning.

Pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat dan kesesuaian kebutuhan masyarakat menjadi kunci perubahan. Purba dkk. (2005) menjelaskan bahwa pengembangan bank sampah ini juga akan membantu pemerintah lokal dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis komunitas secara bijak dan dapat mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Penekan Kajian ini yang menjadi kebaruan dari kajian sebelumnya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang lebih berprespektif perempuan. Peran warga perempuan penting diperhatikan sebagai modal sosial. Warga perempuan dapat menggerakkan individu dan komunitas masyarakat untuk berperan serta dan aktif dalam pengelolaan lingkungan (Blocker dan Eckberg, 1997).

Selain itu, pengelolaan sampah masih belum menjalani proses pengelolaan sampah dengan menggunakan metode *reduce, reuse, recycle*, dan *replant* (4R) dari sumber, pada kajian sebelumnya masih menggunakan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) saja. Dengan demikian pada pengembangan bank sampah dengan swadaya masyarakat di Desa Kembang Kuning, didasari oleh beberapa permasalahan lingkungan di komunitas. Penerapan pengelolaan sampah masih dari sumber (rumah tangga/masyarakat) yang langsung dibuang ke tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas baik dari partisipasi masyarakat/RW atau DKP diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dari TPS diangkut oleh Petugas DKP ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Secara sosial, sebagian besar masyarakat di Desa Kembang Kuning belum peduli terhadap pengelolaan sampah dan walaupun ada pengelolaan sampah masih bersifat individual dan belum terorganisir secara terpadu, sehingga intesitas kebersamaan dalam komunitas masih sangat rendah. Kemudian secara ekonomi, saat ini belum ada nilai ekonomis terhadap pengelolaan sampah, selain masyarakat belum paham terhadap pengelolaan sampah yang mempunyai nilai ekonomis dengan 4R dan sebagian besar kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih rendah dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang tidak diinginkan dan tidak memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan *Research Gap*, kritik terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan khususnya dalam bentuk program Bank Sampah cukup banyak dibahas. Mayoritas program Bank Sampah sudah pada tahap implementasi (Lokita,

2011; Berampu, 2014; Anjani, 2014; Dewinta, 2015), namun sangat disayangkan pada tahap perencanaan pelibatan dan keterwakilan masyarakat oleh pihak perusahaan sangat minim, sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Lokita, 2011).

Hasil penelitian menyebutkan terdapat faktor-faktor yang menghambat dan mendukung partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam program terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam diri) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar diri). Partisipasi masyarakat dalam program dipengaruhi oleh Sikap (Lokita, 2011; Dewinta, 2015), tingkat pengetahuan (Lokita, 2011; Dewinta, 2015), kreativitas (Anjani, 2014; Dewinta, 2015), pendamping program (Anjani, 2014; Dewinta, 2015), dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain tingkat kesempatan (Lokita, 2011), pemasaran produk dan kurangnya komunikasi dengan stakeholder terkait (Anjani, 2014).

Meski pelaksanaan program masih menuai banyak kritik dan memiliki banyak kekurangan, namun beberapa penelitian menunjukkan manfaat yang dirasakan oleh perempuan dengan berpartisipasi dalam program Bank Sampah, diantaranya pengetahuan mengenai pengelolaan Sampah dan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih (Lokita, 2011; berampu, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, program pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk penumbuhan kualitas, mendorong kemampuan, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan suatu program atau kegiatan. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah di Desa Kembang Kuning.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

ISO 26000 mendefinisikan tanggung jawab social sebagai bentuk tanggung jawab suatu organisasi atau instansi atas dampak dari keputusan dan kegiatan usaha yang dilakukan terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui tindakan yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma internasional, serta terintegrasi dengan seluruh aktivitas organisasi atau instansi meliputi kegiatan, produk, maupun jasa (Daniri, 2008).

Menurut Sukada et al. (2007) perbedaan terminologi pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menerjemahkannya dalam teknis pelaksanaannya karena: (1) istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbeda. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan dengan menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”; (2) kata “komitmen perseroan” yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga tidak dapat diartikan serupa dengan kata “tanggung jawab yang melekat”; (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih berorientasi dalam mewujudkan hubungan yang serasi.

Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Salah satu yang diatur dalam PP ini adalah mengenai mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 4 ayat (1) No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab social dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.” Hal ini menerangkan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan sudah harus direncanakan sejak awal oleh perseroan.

Menurut Fajar (2010), tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang bersifat sukarela. Pendapat ini didasari oleh empat hal yaitu, perusahaan berorientasi pada keuntungan, CSR merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan, pelaksanaan CSR tidak sesuai dengan hak kepemilikan privat dan tidak seiringan dengan prinsip efisiensi dalam bisnis. Berbeda dengan Fajar (2010), Sukada et. al. (2007) menyatakan bahwa CSR merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mendorong perusahaan dalam usaha mewujudkan gagasan keadilan sosial serta berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan

Ife (2013) melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung. Beberapa kelompok yang disebut kurang beruntung terkait dengan kelas, ras, gender, lansia, anak dan remaja, penyandang cacat, dan mereka yang terisolasi, serta mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan karena ditinggal orang yang dicintai, ataupun merekayang memiliki masalah keluarga dan pribadi.

Menurut Adi (2013), strategi intervensi sosial pada level komunitas tidak dapat dilepaskan dari strategi model intervensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*community development*) sendiri diistilahkan oleh Ross & Lappin (1967) sebagai penggunaan program pendekatan dan teknik yang mengandalkan peran komunitas lokal sebagai unit dari tindakan dan bertujuan untuk mengkomunikasikan bantuan dari luar, serta berupaya untuk menciptakan stimulasi inisiatif lokal dan kepemimpinan sebagai instrumen utama dari perubahan.

Adi (2012) menyampaikan bahwa karakteristik intervensi komunitas lebih ditekankan pada pencapaian konsensus melalui komunikasi dan proses diskusi (Adi, 2012). Sementara itu, batasan definisi penerima layanan dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah kepada masyarakat lokal, yang komunitasnya terbentuk berdasarkan pada kesatuan geografis. Mereka dalam kesatuan tersebut disebut dengan klien dari *community worker* (Adi, 2012). Tahapan pengembangan masyarakat secara umum menurut Adi (2012) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan meliputi persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat. Penyiapan petugas dilakukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap wilayah yang menjadi fokus sasaran, baik dilakukan formal ataupun informal. Guna menjaga dan mengembangkan kontak dengan masyarakat, petugas harus mampu menawarkan bentuk kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Komunikasi yang baik pada tahap awal biasanya akan memengaruhi keterlibatan masyarakat pada fase berikutnya. Fase ini juga dikenal sebagai fase *engagement*.

2. Tahap assessment dengan mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan yang diekspresikan, serta sumberdaya yang dimiliki komunitas sasaran. Pengkajian dapat dilakukan pada suatu komunitas secara individual ataupun berkelompok.
3. Tahap perencanaan alternatif program dimana petugas secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan, masyarakat mampu memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi, petugas membantu masing-masing kelompok merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap pelaksanaan yang menjadi tahapan paling krusial dalam pengembangan masyarakat. Pada tahapan ini, peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang dikembangkan.
6. Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan, yaitu evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat pada tahapan ini diharapkan membentuk suatu system dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.
7. Tahap terminasi sebagai tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pembangunan partisipatif. Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi, pengambilan keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menjangkau. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial.

Terdapat tiga paradigma pemberdayaan perempuan dengan tujuan yang berbeda, yaitu (Mayoux, 2006):

1. *Feminist empowerment paradigm* yang lebih menitikberatkan perempuan dengan

pendapatan rendah dan difokuskan pada upaya mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia;

2. *Poverty alleviation paradigm* berfokus pada golongan yang termiskin dan berupaya meningkatkan partisipasi perempuan untuk menolong diri mereka sendiri; dan
3. *Financial self sustainability paradigm*, strategi pemberdayaan disadari melibatkan biaya tertentu. Tujuan eksplisit dari paradigma ini adalah mengembangkan perempuan berpendapatan rendah yang telah memiliki usaha sehingga dapat sepenuhnya mandiri secara finansial.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan harus tepat sasaran dan tujuannya. Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah:

1. Meningkatnya peningkatan pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan;
2. Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan social ekonomi produktif keluarga;
3. Berkembangnya kemampuan perempuan dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparatatur maupun warga.

Bank Sampah

Merujuk pada pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle*. Melalui Bank Sampah, disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Unilever Indonesia, 2014).

Pada umumnya Bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang dalam bentuk pinjaman atau kredit, namun dalam konteks persampahan maka yang dimaksud bank sampah adalah lembaga yang kerjanya seperti bank tetapi berurusan dengan sampah. Fungsi bank sampah adalah menyimpan tabungan sampah dari warga masyarakat dan mengubahnya menjadi uang dengan cara menjual sampah tersebut ke pengepul

atau langsung ke industri pengolah sampah. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara menggunakan kembali atau mendaur ulang. Sampah basah yang terdiri dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan kompos. Sampah kering berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang menjadi produk kerajinan tangan. Misalnya, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak dan lain-lain.

Prinsip kerjanya mirip dengan bank konvensional. Nasabah dibuatkan buku akun dan tabungan. Uang tidak langsung diberikan kepada nasabah penabung, tetapi lebih dahulu dimasukkan ke dalam buku tabungan. Nasabah dapat mengambil tabungan setiap saat, satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. Pengelolaan bank sampah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat dengan prinsip “dari masyarakat dan kembali ke masyarakat”.

Bank sampah merupakan salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Bank sampah menjadi solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah, dengan cara mengkuivalensikan sampah dengan uang. Masyarakat pada akhirnya menjadi terdidik untuk menghargai sampah dengan uang.

Selain itu, PT Solusi Bangun Indonesia pun memiliki inovasi dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, yaitu dengan mengembangkan strategi 3R menjadi 4R, yaitu dengan menambahkan komponen *replant* atau menanam kembali. Sehingga dilapang djumpai rumah pengurus dan nasabah bank sampah yang asri karena mereka melakukan penanaman tumbuhan dengan menggunakan sampah yang sudah tidak terpakai.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah Pelita Dusun I yang dilakukan oleh PT. Solusi Bangun Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pada studi ini difokuskan pada Bank Sampah Pelita Dusun I yang berlokasi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yaitu Bank Sampah Pelita Dusun I memiliki pertumbuhan anggota Bank Sampah dan omset yang signifikan. Desa Kembang Kuning juga merupakan desa dengan status ring satu, artinya Desa Kembang Kuning dinilai sebagai salah satu desa yang paling merasakan dampak beroperasinya pabrik SIB karena letak desa yang berdekatan dengan pabrik SIB. Teknik penarikan

informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini memiliki fokus utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus utama pada penelitian ini adalah menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah Pelita Dusun I yang dilakukan oleh PT. Solusi Bangun Indonesia. Bab ini akan menguraikan tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh PT SBI, yaitu tahap persiapan, tahap pemetaan sosial, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Tahap pemberdayaan perempuan melalui Bank Sampah Pelita Dusun I, yaitu:

Tahap Persiapan

Filosofi dasar yang menjadi pegangan seluruh karyawan PT. Solusi Bangun Indonesia, khususnya di Departemen *Community Relations* (Comrel), adalah bagaimana mendorong kemandirian masyarakat terutama di empat bidang: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sedari awal, PT. Solusi Bangun Indonesia sangat tegas dan rigid berkomitem untuk tidak memberikan bantuan yang dalam bentuk tunai. PT SBI berusaha meminimalisir pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai. PT SBI berupaya untuk memberikan bantuan dalam bentuk *inkind*, dengan harapan adanya partisipasi aktif masyarakat. Proses mengubah *mindset* dari pola transaksional secara tunai menjadi non-tunai dalam bentuk pengetahuan atau *knowledge* menjadi tantangan terberat yang dirasakan oleh PT SBI. PT SBI memahami bahwa perubahan *mindset* harus dimulai dari diri sendiri yakni di lingkup internal PT SBI, khususnya bagian Comrel PT. Solusi Bangun Indonesia, sebagai departemen yang akan menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lapangan.

Tidak hanya melakukan internalisasi nilai dan prinsip yang diusung oleh PT SBI. Tim Comrel PT. SBI juga menjalin hubungan dengan pemerintah setempat dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Pemerintah yang dimaksud dimulai dari pengurus RT, pengurus RW atau dusun, dan perangkat desa. PT. SBI berusaha membina hubungan yang harmonis dengan pemerintah setempat agar tercipta komunikasi yang baik. Selain

itu, pemerintah merupakan tokoh yang dianggap berpengaruh di kalangan masyarakat setempat. Selain dengan pemerintah, PT SBI juga membina hubungan dengan masyarakat sekitar. Diwakili oleh tim comrel PT. SBI turun langsung ke lapangan untuk berkenalan dan memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai perwakilan dari PT. SBI. Dalam kesempatan ini juga PT. SBI mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa PT. SBI berniat membuat program CSR di Desa Kembang Kuning sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dusun Narogong atau Dusun I sengaja dipilih sebagai salah satu lokasi sasaran untuk melakukan implementasi program CSR karena beberapa alasan, yaitu Desa Kembang Kuning merupakan desa dengan status ring satu, artinya Desa Kembang Kuning dinilai sebagai salah satu desa yang paling merasakan dampak dari operasional kegiatan pabrik PT. Solusi Bangun Indonesia karena letak desa yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Sejak berpuluh tahun lalu, Dusun Narogong identik dengan kawasan pabrik. Tempat bergulirnya berbagai aktivitas produksi yang menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Namun, kontras dengan posisi Dusun Narogong sebagai penggerak ekonomi, fakta yang tersaji adalah masih banyaknya warga masyarakat di sekitar pabrik yang hidup di bawah ukuran sejahtera.

Tahapan Pemetaan Sosial

Sebelum memberikan bantuan, PT SBI melakukan proses pemetaan social (*social mapping*) dengan menggandeng pihak ketiga. Dalam tahapan ini, PT. SBI dibantu oleh pihak ketiga dengan harapan hasil pemetaan socialnya lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan isu masalah yang mendesak untuk diselesaikan bagi masyarakat di sekitar pabrik. Selain menggunakan data sekunder, observasi lapangan, PT SBI juga melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mencari pokok permasalahan yang ada di desa Kembang Kuning dan bagaimana upaya atau strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Tahap ini juga dilakukan agar dapat mengetahui apakah Desa Kembang Kuning layak dijadikan wilayah implementasi program.

Setelah mengetahui permasalahan prioritas di Desa Kembang Kuning, PT SBI mengundang perwakilan perangkat desa dan masyarakat untuk melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Berdasarkan FGD diketahui bahwa masalah sampah di Desa di Kembang Kuning didasari oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk di Desa Kembang

Kuning, Kecamatan Klapanunggal menyebabkan ruang terbuka hijau habis di bangun untuk rumah tinggal. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena rumah tinggal merupakan satu dari tiga kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. Kondisi ini menjadikan Dusun I menjadi pemukiman padat penduduk yang gersang. Mayoritas warga menginginkan desa tempat tinggal mereka kembali bersih, hijau, dan masyarakatnya berdaya.

Tahapan Perencanaan

Penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bergantung dan mengandalkan petugas kebersihan di wilayah tersebut saja atau pemerintah setempat. Karena jumlah petugas kebersihan per wilayah terbatas, diharapkan masyarakat dan pihak swasta/perusahaan juga turut serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani masalah sampah. Pembahasan rencana program atau kegiatan yang akan dilakukan juga melibatkan masyarakat melalui perwakilan dalam pertemuan yang disebut *Forum Community Advisory Panel* (CAP). Forum CAP dilakukan untuk membahas lebih rinci mengenai masalah yang ada di Desa Kembang Kuning.

Salah satu kegiatan yang dihasilkan dari forum CAP adalah mengelola sampah dengan penerapan prinsip 4-R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Replant*) dalam wujud Bank Sampah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya paham bagaimana memperlakukan sampah, tetapi sekaligus mengelolanya hingga menghasilkan dana untuk mendukung peningkatan ekonomi. Mekanisme pengelolaan sampah melalui Bank Sampah bertujuan untuk mengelola sampah dengan beberapa tahapan proses, yaitu menerima setoran dari nasabah atau anggota bank sampah, menimbang sampah yang disetorkan, memilah sampah sesuai dengan jenis atau klasifikasinya, dan mendistribusikan sampah ke industri pengolahan sampah yang lain atau ke pengepul. Sehingga sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir bisa berkurang. Selain itu, diharapkan melalui mekanisme ini dapat menambah nilai guna suatu barang bekas yang sebelumnya dianggap sudah tidak berguna atau tidak bernilai.

Proses pembentukan Bank Sampah diawali dengan kesepakatan warga membentuk Bank Sampah di Dusun I. Meski terdapat tiga dusun di Desa Kembang Kuning, namun penduduk Dusun I yang paling antusias dan responsif dalam merespon niat baik perusahaan untuk melaksanakan CSR di Desa Kembang Kuning. Untuk membentuk pengurus serta menentukan nama Bank Sampah dilakukan musyawarah. Peserta musyawarah

sepakat Bank Sampah bernama Bank Sampah Pelita Dusun I.

Setelah terbentuk, pengurus Bank Sampah yang berjumlah tujuh orang melakukan study banding dan kunjungan ke Bank Sampah yang sudah lebih dulu ada dan beroperasi. Setelah melihat contoh Bank Sampah yang sudah berjalan dan berdampak positif, pengurus Bank Sampah melakukan proses belajar tentang pengelolaan sampah di kecamatan dan di acara Hari Peduli Sampah Nasional. Untuk memperkuat posisi Bank Sampah, pengurus Bank Sampah mengurus legalitas Bank Sampah Pelita I ke pihak desa hingga terbit SK pengurus dari perangkat desa. Kemudian, pengurus melanjutkan mengurus legalitas ke level kecamatan hingga mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kecamatan.

Setelah terbentuk pengurus, disusun rancangan kegiatan program Bank Sampah Pelita Dusun I yang diketuai oleh Bu Yulia. Program pertama adalah Pengelolaan Sampah yaitu *reduce, reuse, recycle*, dan *replant*. Berdasarkan hasil forum, kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti juga termasuk dalam kegiatan Bank Sampah. Pengurus juga berencana melakukan kegiatan biopori untuk mengurangi genangan air yang berpotensi menimbulkan penyakit. Untuk pengembangan selanjutnya, Bank Sampah berencana membangun saung edukasi terkait sampah dan pengelolaannya serta membentuk warung sembako yang alat tukarnya tidak hanya menggunakan sampah tetapi juga dapat menggunakan bekas minyak goreng atau minyak jelantah.

Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat Dusun I. Pengurus Bank Sampah menyampaikan Informasi kepada masyarakat mengenai pengertian bank sampah, visi bank sampah, rencana kegiatan bank sampah alur proses pelaksanaan bank sampah, mekanisme pemilahan sampah system pembayaran sampah, dan lain sebagainya.

Kemudian, masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota bank sampah, mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran untuk menjadi anggota Bank Sampah cukup mudah, yaitu warga Dusun I diharapkan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan menyerahkan fotokopi KTP. Formulir pendaftaran bisa didapat dari pengurus Bank Sampah. Setelah mengisi formulir pendaftaran, warga dapat menyerahkan formulir beserta fotokopi KTP kepada pengurus Bank Sampah. Pendaftaran dapat dilakukan di setiap awal

bulan hingga tanggal 5 di setiap bulannya. Setelah menyelesaikan syarat pendaftaran, peserta akan diberikan pelatihan teknis mengenai cara memilah sampah serta buku tabungan nasabah.

Kemudian anggota bank sampah akan mengikuti pelatihan teknis. Tujuan diadakan pelatihan teknis adalah untuk memberi penjelasan yang lebih rinci tentang standarisasi system bank sampah, mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan menjadi nasabah bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah di rumah hingga penyetoran ke bank sampah. Dalam pelatihan ini juga nasabah atau anggota bank sampah dihibung sebisa mungkin berusaha untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang dihasilkan, khususnya sampah non organik. Seperti dengan mengurangi penggunaan kantong plastic dengan cara membawa tas belanja sendiri ketika ingin membeli sesuatu di pasar tradisional atau supermarket.

Waktu dan lokasi penyetoran sampah telah disepakati dan diinformasikan sebelumnya, yaitu dua kali dalam seminggu pada hari Selasa dan Jumat pukul 09.00 – 12.00 WIB. Penjadwalan ini bertujuan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan penjualan ke pengepul. Meski jadwal penyetoran sudah direncanakan dan disepakati, kadangkala ada waktu dimana kegiatan penimbangan harus dibatalkan atau ditunda karena ada kegiatan atau agenda yang informasinya mendadak. Penjadwalan juga berfungsi agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

Sampah yang sudah disetor ke bank sampah akan ditimbang dengan alat timbangan yang tersedia. Warga menyetor dalam bentuk sudah berupa sampah non organik, namun belum dipisahkan per kategori. Petugas akan mencatat bobot sampah setelah melakukan penimbangan. Pencatatan dilakukan di buku tabungan nasabah dan di buku rekapitulasi tabungan nasabah. Hal ini dimaksudkan agar ada *back up* jika buku tabungan nasabah hilang. Hasil penimbangan sampah tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan dan buku catatan. Pada bank sampah Pelita Dusun I, terdapat tiga cara penarikan tabungan, yaitu sebulan sekali, setahun sekali, atau diambil ketika butuh. Cara penarikan tabungan bergantung kepada kebutuhan dan keinginan nasabah. Harga sampah per kilo saat ini berada di kisaran Rp50 untuk sampah beling dan Rp 70.000 untuk sampah komputer. Sampah yang telah ditimbang dilakukan pemilahan berdasarkan jenis kategorinya, yaitu sampah kertas, logam, barang satuan, plastic, dan kaca.

Bank Sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati.

Pengepul yang bekerjasama dengan Bank Sampah Pelita Dusun I adalah pengepul dari wilayah Gunung Putri. Setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat, kemudian sampah langsung diangkut ke tempat pengelolaan sampah berikutnya. Pengangkutan sampah oleh pengepul dijadwalkan setiap dua minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan yang telah berlangsung, sebagaimana setiap program CSR PT SBI diwajibkan menjalankan evaluasi secara berkala minimal satu bulan kali dalam enam bulan, termasuk diantara Bank Sampah Pelita Dusun I. Evaluasi yang dilakukan berorientasi pada proses, mulai dari kegiatan persiapan hingga implementasi kegiatan. Evaluasi difokuskan mengidentifikasi kendala dan hambatan pada setiap proses atau tahap pengimplementasian program. Karena baik pihak PT SBI maupun pengurus Bank Sampah berkomitmen menjadikan kegiatan Bank Sampah sebagai kegiatan pemberdayaan yang membutuhkan waktu lama dalam prosesnya sehingga evaluasi secara berkala berperan penting untuk keberhasilan program.

Karena sedang merebaknya pandemic covid-19 di seluruh Indonesia khususnya di wilayah pelaksanaan program, kebijakan evaluasi pun mengalami perubahan dengan. Pihak SBI dan pengurus Bank Sampah terus berupaya untuk tetap dapat melakukan evaluasi, tetapi sejauh ini kapasitas sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang masih menjadi Kendala. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan PT SBI dan pengurus untuk menghadapi pandemi covid-19. Dalam keadaan normal atau regular, evaluasi akan dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Sejak pandemi covid-19 evaluasi belum dapat dilakukan kembali sebagai langkah mengurangi aktivitas kerumunan.

Pada awal berdirinya Bank Sampah Pelita Dusun I pada Januari 2019, bank sampah hanya beranggotakan 7 pengurus, kemudian di akhir tahun mencapai 26 orang anggota bank sampah, 7 diantaranya merupakan pengurus. Meski operasional kegiatan bank sampah terkendala selama pandemic covid-19 jumlah nasabah bank sampah mengalami peningkatan sebesar 105% atau berjumlah 20 orang. Pada akhir tahun 2020 jumlah nasabah bank sampah mencapai 46 orang.

Pembahasan

Dalam pelaksanaan program CSR, terdapat lima tahapan yang dilakukan oleh PT SBI, yaitu dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan tahapan pemetaan social (social mapping) dan

tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Tahapan yang dilakukan oleh PT SBI secara umum memiliki kesamaan dengan konsep tahapan pengembangan masyarakat dari Adi (2012), yaitu persiapan, asesmen, perencanaan alternative program, performulasian rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi dan tahapan terminasi. Meski ada tahapan yang menggunakan penamaan yang berbeda, namun proses yang dilakukan serupa seperti tahapan pemetaan social yang dilakukan oleh PT SBI dengan tahapan asesmen yang dikemukakan oleh Adi (2012). Terdapat juga tahapan yang dilakukan oleh PT SBI dengan menggabungkan dua konsep tahapan yang dikemukakan oleh Adi (2012), yaitu tahapan perencanaan yang dilakukan oleh PT SBI merupakan gabungan dari tahapan perencanaan alternative program dan performulasian rencana aksi. Terdapat juga tahapan yang tidak sama antara yang dilakukan oleh PT SBI dengan yang dikemukakan oleh Adi (2012), yaitu tahapan terminasi program.

PT. Solusi Bangun Indonesia memulai kegiatan programnya dengan melakukan persiapan. Tahapan persiapan berisi beberapa kegiatan, yaitu internalisasi nilai CSR SBI, menjalin hubungan dengan stakeholder program dan penentuan lokasi sasaran program. Serupa dengan tahapan persiapan yang dikemukakan Adi (2012) dimana dalam tahapan persiapan memuat persiapan petugas lapangan, penentuan lokasi, dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait.

Internalisasi nilai CSR dilakukan kepada tim departemen Comrel yang bertugas untuk melaksanakan program CSR perusahaan. Hal ini dilakukan agar persepsi yang dimiliki oleh anggota tim Comrel dengan pihak perusahaan sama. Internalisasi nilai CSR kepada tim comrel merupakan hal penting karena jika terjadi perbedaan pemahaman antara tim Comrel dengan perusahaan, dikhawatirkan terjadi perbedaan penyampaian kepada masyarakat dengan yang diharapkan oleh pihak perusahaan.

PT SBI, yang diwakili dengan tim comrel juga menyadari bahwa hubungan yang terbangun dengan stakeholder yang berkaitan dengan implementasi program sangat penting. Oleh karena itu, di awal PT SBI sudah memetakan stakeholder inti dari dari program, yaitu masyarakat dan perangkat desa. Sebelum pelaksanaan program, PT SBI melakukan pendekatan dengan masyarakat dan perangkat desa. Komunikasi yang baik diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program di kemudian hari.

Meski demikian, jika dalam Adi (2012) dikatakan bahwa dalam tahap persiapan dilakukan studi kelayakan terhadap wilayah yang menjadi

focus pengimplementasian program, dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT SBI wilayah yang menjadi target sasaran dipilih secara sengaja karena Dusun Narogong termasuk dalam wilayah ring 1 program CSR PT. SBI. Studi kelayakan terhadap lokasi sasaran tetap dilakukan, namun dilakukan dalam tahap selanjutnya yaitu pemetaan sosial.

Meskipun menggunakan nama yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya tahap pemetaan social mirip dengan tahap asesmen. Pada tahapan asesmen dilakukan pengkajian terhadap masalah yang harus diselesaikan dan sumberdaya yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Pada tahap pemetaan social yang dilakukan oleh PT SBI, terlebih dahulu dilakukan pemetaan social terhadap wilayah yang akan dijadikan sasaran implementasi program. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah lokasi tersebut layak untuk diberikan program CSR.

Asesmen dilakukan pada masyarakat Desa Kembang Kuning secara berkelompok dengan metode FGD. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tahapan pemetaan social adalah stakeholder program mengetahui permasalahan utama apa yang menjadi masalah di masyarakat dan perlu diselesaikan segera. Selain itu, dalam tahapan ini mencoba merinci akar permasalahan dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk mengatasi masalah tersebut. Meski demikian, peneliti tidak melihat adanya proses mendalam saat mengidentifikasi sumberdaya apa yang dimiliki oleh komunitas untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Tahap berikutnya yang dilakukan oleh PT SBI adalah perencanaan program. Tahap perencanaan program jika ditelaah dengan menggunakan konsep pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Adi (2012) mencakup dua tahapan, yaitu tahapan perencanaan alternative program dan perumusan rencana aksi. Pada tahap perencanaan alternative program terhadap proses memunculkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaannya, saat dilakukan forum CAP pihak SBI sebagai fasilitator berusaha menggali ide-ide yang bersumber dari masyarakat dan pihak pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dari beberapa pilihan program yang dihasilkan oleh forum, diputuskan bahwa akan melaksanakan program bank sampah. Meski demikian, terdapat beberapa ide seperti kerja bakti yang juga diakomodir menjadi bagian rangkaian program bank sampah.

Masih dalam tahapan perencanaan, dilakukan juga tahapan perumusan rencana aksi, yaitu tim comrel membantu anggota forum CAP untuk merumuskan rancangan kegiatan yang akan

dilakukan. Kegiatan utama yang menjadi ruh bank sampah adalah penerapan prinsip 4R, yang diwujudkan dengan peanaman kembali dan mekanisme bank sampah. Mekanisme bank sampah yang dimaksud adalah kegiatan bank sampah mulai dari pemilahan sampah hingga penjualan sampah kepada pengepul. Kemudian dalam forum juga disepakati terdapat kegiatan penunjang yaitu kerja bakti dan pembuatan lubang biopori. Selain itu, kegiatan bank sampah diharapkan dapat dikembangkan menjadi warung sembako. Pengurus pun berencana untuk ditahap selanjutnya memiliki saung edukasi sampah dan pengelolaan sampah.

Sebelum masuk ke tahap implementasi program, pengurus bank sampah mengurus legalitas kelembagaan mereka. Hal ini dilakukan agar bank sampah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan tercatat sebagai bank sampah yang resmi. Hal ini dilakukan agar memperkuat kedudukan Bank Sampah Pelita Dusun I dan meminimalisir masalah yang ditimbulkan terkait legalitas bank sampah.

Tahapan implementasi merupakan tahapan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini diharapkan peran masyarakat agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Pada tahap implementasi ini diharapkan masyarakat aktif dan terlibat langsung. Pada tahapan ini PT SBI memosisikan diri sebagai fasilitator, yaitu sebagai pendamping program dan pemberi pelatihan. Pelatihan dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan dari pengurus program dalam menjalankan kegiatan bank sampah. Pengetahuan dasar mengenai mekanisme bank sampah didapatkan oleh pengurus dari penyuluh kecamatan. PT SBI pun berusaha memfasilitasi pelatihan untuk menerapkan prinsip reuse dan recycle melalui kerjasama dengan komunitas yang memiliki keahlian mengelola dan mendaur ulang sampah. Selain itu, PT SBI bekerjasama dengan kementerian kehutanan untuk menyediakan bibit tanaman untuk ditanam di wilayah dusun I.

PT SBI menyadari bahwa evaluasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan program, sehingga memasukan tahap evaluasi dalam rangkaian pemberdayaan perempuan melalui bank sampah. Tahapan evaluasi berfungsi sebagai bentuk pengawasan dari pengelola dan penyelenggara terhadap program yang dijalankan. Dalam melakukan evaluasi program bank sampah, PT SBI melibatkan pengurus dan anggota bank sampah agar hasil evaluasi terhadap kendala dan hambatan yang terjadi selama program berlangsung menjadi pelajaran bagi keduanya. Sehingga keduanya bisa berusaha untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang ada selama berlangsungnya program.

Dalam konsep pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Adi (2012) terdapat tahap terminasi dimana pada tahap tersebut sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Namun, sejak awal PT SBI mendesain program bank sampah sebagai program jangka panjang dan berkelanjutan. Saat ini kegiatan bank sampah baru sampai pada tahap implementasi sehingga belum mencapai tahap ini. PT SBI dan Bank Sampah sudah merencanakan pengembangan dari kegiatan bank sampah ke tahap selanjutnya, namun kegiatan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak pengurus masih takut untuk melaksanakan program di masa-masa pandemi seperti ini. Bank sampah juga diharapkan bisa terjaga keberlanjutannya, karena Bank Sampah merupakan sebuah program yang didasari kesadaran dan semangat masyarakat dalam menjadikan lingkungannya lebih baik.

SIMPULAN

PT SBI memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan stakeholder di sekitar wilayah operasional. Bagi SBI, kesuksesan SBI tidak hanya dilihat dari keberhasilan dan peningkatan kinerja Perseroan semata, namun juga bagaimana SBI bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat sekitar. Melalui partisipasi dan investasi sosial SBI meyakini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, SBI menetapkan 5 (lima) pilar program CSR yang menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam program CSR, yaitu SBI Cerdas, SBI Sehat, SBI Mandiri, SBI Lestari, dan SBI Peduli. SBI Lestari merupakan program dan kegiatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di masyarakat, termasuk pembangunan sarana dan prasarannya. Salah satu program SBI lestari adalah Bank Sampah Pelita Dusun I.

Dalam pelaksanaan program CSR, terdapat lima tahapan yang dilakukan oleh PT SBI, yaitu dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan tahapan pemetaan social (social mapping) dan tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Tahapan yang dilakukan oleh PT SBI secara umum memiliki kesamaan dengan konsep tahapan pengembangan masyarakat dari Adi (2012), yaitu persiapan, asesmen, perencanaan alternative program, performulasian rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi dan tahapan terminasi. Meski ada tahapan yang menggunakan penamaan yang berbeda, namun proses yang dilakukan serupa seperti tahapan pemetaan social yang dilakukan oleh PT SBI dengan tahapan asesmen yang dikemukakan oleh Adi (2012). Terdapat juga tahapan yang

dilakukan oleh PT SBI dengan menggabungkan dua konsep tahapan yang dikemukakan oleh Adi (2012), yaitu tahapan perencanaan yang dilakukan oleh PT SBI merupakan gabungan dari tahapan perencanaan alternatif program dan performulasian rencana aksi. Terdapat juga tahapan yang tidak sama antara yang dilakukan oleh PT SBI dengan yang dikemukakan oleh Adi (2012), yaitu tahapan terminasi program. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PT SBI dalam penyelenggaraan program bank sampah secara keseluruhan menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat.

SARAN

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran kepada pihak terkait terutama PT. Solusi Bangun Indonesia. Adapun sarannya diantara lain:

1. PT Solusi Bangun Indonesia perlu memasukan tahapan terminasi dalam pelaksanaan program CSR khususnya untuk program pemberdayaan. Karena tahapan terminasi dapat berfungsi untuk mendorong kemandirian pengelola program untuk menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan program baik dari segi substansial maupun manajemen.
2. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan yang diberikan sebaiknya tidak hanya berhubungan dengan substansial pelaksanaan program, tetapi juga sebaiknya memasukan pelatihan manajemen program seperti mengelola dinamika kelompok atau konflik. Karena kemampuan yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program tidak hanya mengenai substansi program, tetapi juga mengenai manajemen program.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Revisi ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adi, I. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kjian Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anjani, F. G. (2014). *Dinamika Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor*. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Berampu, A. C. (2014). *Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah*. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.

-
- Blocker, T.J., & Eckberg, D.L., 1997. Gender and Environmentalism: Result from the 1993 General Social Survey. *Social Science Quarterly*, 78(4):841-858.
- Daniri, M.A. (2008) Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. [Internet]. [Diakses pada] Februari, 28 2020. Dapat diunduh pada <http://Kadin-indonesia.or.id/images/dokumen>
- Dewinta, N. (2015). Hubungan Peran Pendamping dengan Keberdayaan Perempuan dalam Program Corporate Social Responsibility (CRS) PT ITP. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Fajar, M. (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Cambridge University Press.
- Lokita, D. A. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengolahan Sampah (Kasus Implementasi Corporate Social Responsibility PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor). *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Mayoux, I. (2001a). *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment: Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation.
- Purba, dkk. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ross, M. G., & Lippin, W.B. (1965). *Community Organization: Theory, Principles, and Practice* (2nd Ed.). New York: Harper & Row Publishers.
- Sukada, dkk. (2007). *Membumikan Bisnis Bekerlanjutan : Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Sumodiningrat, G. (2000). *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.
- Yayasan Unilever Indonesia. (2014). *Buku Panduan Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.